

ABSTRAK

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, tidak terkecuali anak terlantar. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia mengatur tentang perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan No 35 Tahun 2014. Fokus rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan, kemudian bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Yayasan atau Panti Asuhan yang ada di sekitar Kabupaten Bangkalan, buku-buku, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah melakukan beberapa upaya untuk bisa memberikan hak-hak anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kemudian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar yaitu membaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, permudah akses bagi anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan sekalipun yang belum berada dalam pengasuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Kata Kunci : Anak Terlantar, Perlindungan Hukum, Hak Anak, Jaminan Sosial

ABSTRACT

Children have a strategic role in ensuring the survival of nations and countries in the future, including homeless child. As a state of law, Indonesia governs the protection of children under legislation on law number 35 of 2014. The problem in this thesis is how does the execution of legal protection of child homeless to get health insurance in Bangkalan, then how did the government act when in the execution of legal protection of homeless child to get health insurance in Bangkalan hasn't been executed in accordance with positive laws.

This thesis uses a type of juridical empirical with fact approach. The source of this thesis is data from social government in Bangkalan, foundation, orphanage's in Bangkalan, books on law and legislation. The next step of gathering data is an interview, observation, and documentation. The instruments of thesis used researchers themselves, interview guide, camera or handphone, paper and pulpen. Then analysis data is using descriptive analysis.

Thesis results concluded that the execution of legal protection of homeless child to get health insurance in Bangkalan it has been done by legislation. Social Government in Bangkalan has been doing some trying to give up homeless child's rights as doing records them, giving away homeless child services and sent to children's social institutions. But the effort is not fully effective. Then the action that the government in order to promote welfare of homeless child is freeing the cost of education for homeless child and poor families, plenty of access to the scholarship, easy access for homeless child to get health insurance even if they are not in social institution and improve society participation.

Keywords: Homeless child, Legal Protection, Children's Rights, Insurance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Kegunaan	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Lokasi Penelitian	12
1.6.4 Data Penelitian.....	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK TERLANTAR DAN JAMINAN SOSIAL

2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum	18
2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Anak Terlantar	20
2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak.....	20
2.2.2 Pengertian Anak Terlantar	23
2.2.3 Ciri-ciri Anak Terlantar.....	24
2.3 Tinjauan Umum Jaminan Sosial	25
2.3.1 Pengertian Jaminan Sosial	25
2.3.2 Fungsi Jaminan Sosial.....	30
2.3.3 Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	31
2.3.4 Peraturan Perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial..	32
2.4 Tinjauan Tentang BPJS Kesehatan	33
2.4.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	33

2.4.2 Peraturan Perundang-undangan tentang BPJS Kesehatan . 36

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR
DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DI
BANGKALAN**

3.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.....	38
3.2	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan di Bangkalan	41
3.2.1	Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	41
3.2.2	Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	45
3.3	Tindakan dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar	56

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	95
-----------------------------	-----------

DAFTAR BAGAN

1.1 Bagan Skema Struktural Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan	40
---	----

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial	52
1.2 Tabel Jumlah LKSA di Kabupaten Bangkalan	53
1.3 Tabel Jumlah Anak Panti Asuhan Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2015-2017	54